

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instrumen utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Sadesmesli et al., 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021, RTRW di Indonesia dibagi menjadi RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. RTRW Kabupaten memuat perencanaan struktur ruang dan pola ruang di wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta ketentuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (Madaul & Ibal, 2023). Setiap wilayah kabupaten harus memiliki pedoman penataan ruang yang berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan dan melaksanakan pembangunan wilayah, yang kemudian dirumuskan dan dituangkan ke dalam dokumen RTRW (Yacob et al., 2024). Namun, implementasi RTRW Kabupaten di Indonesia menghadapi berbagai tantangan (Rahmadani et al., 2025).

Tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi RTRW Kabupaten di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya tata ruang (Rahmadani et al., 2025). Lemahnya koordinasi antar instansi serta tumpang tindih kewenangan mengakibatkan implementasi rencana tata ruang tidak selaras dengan praktik di lapangan. Banyak kebijakan sektoral berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi dengan komprehensif dalam kerangka RTRW (Hidayatulloh et al., 2025). Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rencana tata ruang dapat terjadi karena tidak adanya sosialisasi kebijakan RTRW yang cukup kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan kurangnya sumber daya keuangan dan tenaga ahli, sikap pelaksana yang belum sepenuhnya proaktif serta birokrasi yang masih rumit (Rahmadani et al., 2025). Selain itu, hambatan Implementasi RTRW juga dihadapi dari aspek monitoring dan evaluasi (Hidayatulloh et al., 2025).

Hambatan dalam implementasi RTRW dari aspek monitoring dan evaluasi adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan RTRW. Hal tersebut menyebabkan sulitnya akan pencegahan penyimpangan pemanfaatan ruang (Hidayatulloh et al., 2025). Dalam pengelolaan penggunaan lahan, meningkatnya kebutuhan akan lahan akibat pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan (Ndofah & Santosa, 2023). Perubahan penggunaan lahan adalah bertambah atau berkurangnya suatu

jenis penggunaan lahan menjadi jenis lainnya yang disertai dengan perubahan fungsi pada kurun waktu yang berbeda (Rochman & Muryamto, 2023). Perubahan penggunaan lahan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tetapi juga oleh berbagai variabel lain, seperti kepadatan penduduk, jarak ke pusat pemerintahan, jarak menuju jalan utama, kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. (Kaswanto et al., 2021). Tak hanya itu terdapat juga variabel pendorong perubahan penggunaan lahan seperti jarak terhadap sungai dan jarak terhadap permukiman (Hapsary et al., 2021). Maka dari itu, dalam memastikan dinamika perubahan lahan tetap konsisten perlu adanya evaluasi terhadap kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW.

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW menjadi hal penting dalam mendukung tercapainya penggunaan lahan yang optimal (Perkasa et al., 2022). Evaluasi rencana tata ruang dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, pemerintah daerah diwajibkan melakukan peninjauan kembali RTRW setiap lima tahun. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan wilayah, kebijakan nasional, serta dinamika lingkungan hidup. Kebijakan ini menjadi dasar hukum bagi Kabupaten Blitar untuk melakukan evaluasi terhadap RTRW.

Kabupaten Blitar merupakan wilayah dengan karakteristik agraris, namun dalam dekade terakhir mengalami transformasi menuju kawasan perkotaan dan jasa. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan pulau, luas wilayah Kabupaten Blitar mencapai 1.745,383 km². Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan, 220 desa, dan 28 kelurahan, dengan keanekaragaman geografis yang mempengaruhi kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Blitar telah diatur dalam penataan ruang berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 adalah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031. Penataan ruang berupa struktur ruang dan pola ruang digunakan untuk arahan pengaturan penggunaan lahan wilayah (Sadesmesli et al., 2017). Namun pembangunan di Kabupaten Blitar terlihat pada penggunaan lahan yang makin berkembang dan dinamis. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya pamantauan karena seringkali penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya

(Rahadi et al., 2016). Pemantauan dilakukan berdasarkan peraturan penataan ruang pada RTRW Kabupaten yang disebut sebagai evaluasi.

Evaluasi RTRW Kabupaten Blitar memiliki urgensi tinggi mengingat dinamika sosial ekonomi dan fisik wilayah yang sangat cepat. Hal ini juga didukung karena terjadinya pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar pada tahun 2010 yang semula berada di Kota Blitar dipindah ke Kecamatan Kanigoro sebagai bagian dari Kabupaten Blitar. Evaluasi terhadap pola ruang yang tercantum dalam RTRW menjadi tahapan penting dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi lahan berkaitan erat dengan aspek penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan ruang, pemerataan pembangunan, ke seimbangan dan keadilan wilayah, serta tetap menjaga prinsip keberlanjutan lingkungan (Sadesmesli et al., 2017). Evaluasi tata ruang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara rencana tata ruang terhadap kondisi di lapangan, sehingga pemanfaatan ruang dapat diselaraskan dengan perencanaan awal. (Iskandar et al., 2016).

Evaluasi RTRW perlu dilakukan untuk menyelaraskan antara rencana tata ruang dengan kondisi eksiting agar penggunaan lahan yang optimal dapat dicapai dalam perencanaan berkelanjutan (Hafidzah et al., 2025). Selain itu, evaluasi ini dapat membantu mitigasi masalah seperti fragmentasi lahan pertanian dan perluasan perkotaan yang tidak terkendali (Hafidzah et al., 2025; Konyango et al., 2021). Pelaksanaan evaluasi RTRW sebagai dasar peninjauan kembali perlu dilakukan karena kebijakan penataan ruang harus sinkron dengan kebijakan dengan hierarki di atasnya yaitu RTRW Provinsi Jawa Timur. RTRW Jawa Timur sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043. Maka dari itu, "Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Pola Ruang Sebagai Dasar Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Blitar" diharapkan dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar agar menjadi rencana perencanaan tata ruang yang lebih responsif terhadap dinamika perkembangan wilayah serta kebutuhan masyarakat.

1.2 Rumusan Permasalahan

Evaluasi secara menyeluruh terhadap penetapan tata ruang menjadi aspek penting untuk mendukung pengelolaan wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Blitar (Mansyur et al., 2025). Evaluasi penggunaan lahan terhadap RTRW Kabupaten Blitar merupakan sebuah keharusan untuk memastikan bahwa arah pengembangan wilayah tetap relevan dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat masa kini. RTRW berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga kesesuaian antara

perencanaan dan realisasi di lapangan menjadi tolak ukur penting keberhasilan kebijakan tata ruang (Sadesmesli et al., 2017). Perkembangan wilayah Kabupaten Blitar menunjukkan perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir akibat peningkatan aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan konversi lahan pertanian ke non-pertanian (Rahadi et al., 2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar lahan pertanian pada tahun 1995 – 2025 mengalami penurunan mencapai 8.666 Ha (Kumala et al., 2026). Fenomena ini menuntut dilakukannya peninjauan kembali terhadap RTRW yang telah ditetapkan, mengingat dokumen RTRW Kabupaten Blitar 2011–2031 belum mengalami pembaruan yang sesuai dengan dinamika di lapangan. Hal ini memperkuat urgensi untuk menelaah **apakah terjadi Ketidakesesuaian antara perubahan penggunaan lahan eksisting dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW Kabupaten Blitar?**

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penggunaan lahan eksisting tahun 2025 terhadap Rencana Pola Ruang sebagai dasar peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar tahun 2011 - 2031. Sasaran yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tugas akhir adalah sebagai berikut

1. Mengidentifikasi penggunaan lahan di Kabupaten Blitar Tahun 1995, 2005, 2015, 2025 dengan pendekatan penginderaan jauh.
2. Menganalisis perubahan penggunaan lahan Kabupaten Blitar.
3. Menganalisis variabel pengaruh perubahan penggunaan lahan Kabupaten Blitar.
4. Menghitung simpangan ketidakesesuaian penggunaan lahan eksisting tahun 2025 dengan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Blitar.
5. Menganalisis evaluasi kesesuaian RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031.

1.4 Ruang Lingkup

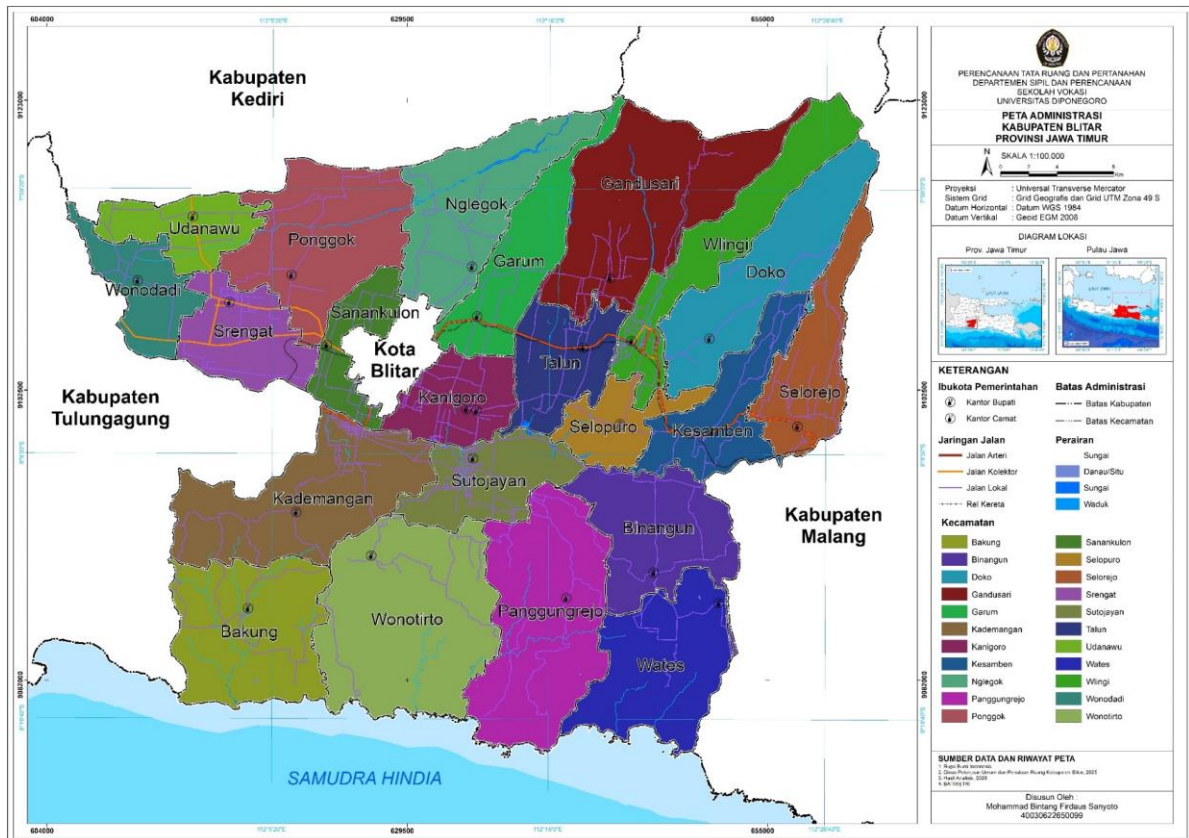
Ruang lingkup penelitian ini dijelaskan berdasarkan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah merupakan batasan area yang menjadi lokasi penelitian, sedangkan ruang lingkup materi adalah batasan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam 10 kabupaten terluas. Luas wilayah Kabupaten Blitar mencapai 1.745,383 km² yang terdiri atas 22 kecamatan, 220 desa, dan 28 kelurahan. Kabupaten Blitar memiliki posisi yang

sangat strategis baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Secara geografis, Kabupaten Blitar terletak pada koordinat 111°40'–112°10' Bujur Timur dan 7°58'–8°9'5" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Blitar secara administratif berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang



Sumber : Hasil Analisis, 2026

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Blitar

Pembagian wilayah oleh Sungai Brantas di Kabupaten Blitar menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Blitar Selatan dan Kabupaten Blitar Utara yang menambah kekayaan geografis dalam mendukung sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Berdasarkan fungsi wilayah pengembangan RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar berperan sebagai kawasan pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Kegiatan di sektor pertanian masih memegang peranan utama dalam perekonomian di Kabupaten Blitar.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang dibahas dalam tugas akhir ini berfokus pada objek-objek berikut.

1. Identifikasi Penggunaan Lahan

Identifikasi penggunaan lahan di Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan pendekatan penginderaan jauh metode klasifikasi terbimbing atau *supervised classification* berdasarkan citra satelit Landsat 5 untuk tahun 1995 dan 2005, Landsat 8 untuk tahun 2015 Landsat 9 untuk tahun 2025 yang diperoleh menggunakan *Google Earth Engine*. Peta penggunaan lahan hasil pengolahan penginderaan jauh perlu dilakukan validasi di lapangan untuk uji akurasi penggunaan lahan dengan pendekatan koefisien *kappa*.

2. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan

Analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan membandingkan luasan penggunaan lahan pada rentang tahun yang berbeda yaitu tahun 1995, 2005, 2015 dan 2025.

3. Analisis Variabel Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan

Analisis variabel pengaruh perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan menghitung pengaruh dari beberapa variabel berdasarkan analisis perubahan penggunaan lahan Kabupaten Blitar. Variabel yang digunakan antara lain jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jarak terhadap jalan utama, jarak terhadap pusat pemerintahan, jarak terhadap sungai, jarak terhadap permukiman kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan.

4. Menghitung Simpangan Ketidakesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting terhadap Rencana Pola Ruang RTRW

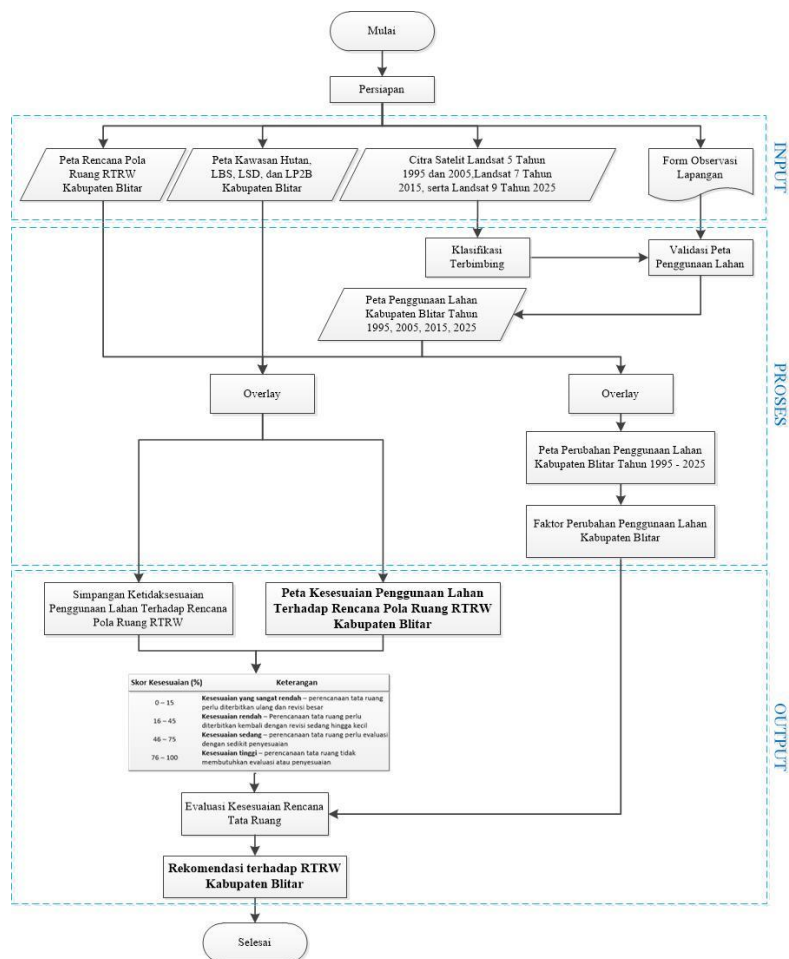
Simpangan ketidakesesuaian didapatkan berdasarkan analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan pendekatan *overlay* untuk menghasilkan peta kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang. Perhitungan simpangan ketidakesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang RTRW untuk mengetahui klasifikasi tingkat kesesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.

5. Analisis Evaluasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang

Evaluasi rencana tata ruang didasarkan pada hasil analisis tingkat kesesuaian penggunaan lahan eksisting terhadap rencana pola ruang RTRW. Hasil dari analisis evaluasi digunakan untuk memberikan rekomendasi pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Rekomendasi yang diberikan adalah pelaksanaan peninjauan RTRW Kabupaten Blitar tahun 2011 – 2031.

1.5 Tahapan/Proses

Tahapan dan proses dalam menentukan kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang RTRW dijelaskan melalui diagram alir dibawah ini.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 1. 2. Kerangka Analisis

Pelaksanaan pada tugas akhir ini memerlukan beberapa tahapan dan proses yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahapan pertama dimulai dari persiapan yang mencakup identifikasi permasalahan dan penetapan lokasi wilayah studi penelitian, penetapan tujuan dan sasaran penelitian, serta menyusun kebutuhan akan data yang digunakan dalam penelitian. Tahap ini diperlukan kajian Literatur yang berfokus pada kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang untuk mendapatkan gambaran dan teknik analisis yang sesuai dengan tema penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi lapangan yang bertujuan untuk validasi penggunaan lahan untuk mengetahui tingkat keakuratan data hasil klasifikasi. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari studi literatur dan telaah dokumen. Telaah dokumen berupa Citra Satelit Landsat yang didapatkan melalui *Google Earth Engine*. Selain itu data sekunder juga didapatkan melalui permohonan data ke Instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait data rencana pola ruang RTRW Kabupaten Blitar.

3. Tahap Analisis

Tahap analisis dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial yang menggunakan *software* ArcGIS 10.8. Proses pengolahan dan analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang sebagai berikut.

- 1) Melakukan identifikasi penggunaan lahan eksisting berdasarkan citra landsat menggunakan metode klasifikasi terbimbing. Pengolahan menggunakan metode klasifikasi terbimbing dimulai dengan menentukan *training area* berdasarkan interpretasi citra satelit. Selanjutnya berdasarkan sampel tersebut digunakan algoritma berupa *maximum likelihood classification* untuk menentukan klasifikasi pada nilai piksel berdasarkan probabilitas dalam sampel piksel. Penggunaan lahan terbagi menjadi 5 kelas yaitu badan air, hutan, lahan pertanian, lahan terbuka, lahan terbangun.
- 2) Melakukan validasi peta penggunaan lahan dengan menggunakan metode uji akurasi berdasarkan koefisien *kappa*. Untuk mendapatkan nilai akurasi yang komprehensif, perlu dibuat *confusion matrix* yang menggambarkan perbandingan sistematis antara hasil klasifikasi dengan kondisi eksisting di lapangan. Matriks ini menyajikan informasi detail tentang kecocokan dan ketidakcocokan klasifikasi untuk setiap kategori penggunaan lahan, serta memungkinkan perhitungan berbagai parameter akurasi seperti, *user's accuracy*, *producer's accuracy*, *overall accuracy*, dan koefisien *Kappa*.
- 3) Membandingkan penggunaan lahan tahun 1995, 2005, 2015, dan 2025 untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Blitar. Analisis ini

menggunakan metode *overlay* dan perhitungan luasan dari masing-masing klasifikasi penggunaan lahan. Hasil dari analisis ini dapat divisualisasikan menggunakan peta perubahan penggunaan lahan dan diagram luasan perubahan penggunaan lahan.

- 4) Mengitung kedekatan hubungan variabel pengaruh perubahan penggunaan lahan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan korelasional. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Blitar.
- 5) Membandingkan penggunaan lahan eksisting tahun 2025 dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 berdasarkan kelas penggunaan lahan serta klasifikasi rencana pola ruang RTRW. Perbandingan ini menggunakan pendekatan spasial dengan metode *overlay* untuk mengetahui gap kesesuaian. Gap kesesuaian ditentukan berdasarkan deliniasi dan luasan untuk mendapatkan peta kesesuaian lahan dan nilai simpangan ketidaksesuaian penggunaan lahan.
- 6) Melakukan perhitungan simpangan ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting terhadap rencana yang sudah ditetapkan dalam persentase. Simpangan tersebut akan dilakukan klasifikasi tingkat kesesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. Klasifikasi tingkat kesesuaian merupakan nilai hasil evaluasi yang digunakan sebagai dasar perumusan rekomendasi RTRW.
- 7) Menyusun rekomendasi terhadap RTRW Kabupaten Blitar berdasarkan hasil analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang RTRW. Rekomendasi yang diberikan akan digunakan sebagai dasar kebijakan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar.

1.6 Metode dan Hasil Akhir

1.6.1 Metode

A. Metode Penelitian

Penelitian Tugas Akhir ini menerapkan metode kuantitatif melalui pendekatan analisis spasial berupa *overlay* dan *Supervised Classification* yang menggunakan software ArcGIS 10.8 serta menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan korelasional.

B. Data Penelitian

Data merupakan komponen penting dalam pelaksanaan penelitian. Untuk itu perlu adanya penentuan dan inventarisasi data untuk mempermudah proses pengumpulan data. Penyajian kebutuhan data dapat ditampilkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 1. 1. Kebutuhan Data

No	Data	Tujuan	Tahun Data	Jenis Data	Metode Pengambilan Data	Metode Analisis	Sumber Data
1.	Citra Landsat 5, 8, 9	Mengidentifikasi Penggunaan Lahan	1995, 2005, 2015, 2025	Data Sekunder	Pengolahan Citra Satelit	Analisis Kuantitatif <i>Supervised Classification</i>	<i>Google Earth Engine</i>
2.	Peta Kemiringan Lereng	Mengidentifikasi Variabel Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan	2017	Data Sekunder	Telaah Dokumen	Analisis Kuantitatif <i>Slope</i>	DEMNAS
3.	Peta Pusat Pemerintahan		2023	Data Sekunder	Telaah Dokumen	Analisis Kuantitatif <i>Euclidean Distance</i>	DPUPR Kabupaten Blitar
4.	Peta Kepadatan Penduduk		2025	Data Sekunder	Telaah Dokumen	Analisis Kuantitatif <i>Reclassify</i>	BPS Kabupaten Blitar
5.	Peta Jaringan Jalan		2023	Data Sekunder	Telaah Dokumen	Analisis Kuantitatif <i>Euclidean Distance</i>	DPUPR Kabupaten Blitar
6.	Peta Curah Hujan		2023	Data Sekunder	Telaah Dokumen	Analisis Kuantitatif <i>Reclassify</i>	DPUPR Kabupaten Blitar
7.	Peta Jenis Tanah		2023	Data Sekunder	Telaah Dokumen	Analisis Kuantitatif <i>Reclassify</i>	DPUPR Kabupaten Blitar
8.	Peta Kawasan Hutan		Identifikasi Simpangan Penggunaan Lahan dan Rencana Pola Ruang	2021	Data Sekunder	Telaah Dokumen	Analisis Kuantitatif <i>Reclassify</i>
9.	Peta Lahan Baku Sawah	2024		Data Sekunder	Telaah Dokumen	Analisis Kuantitatif <i>Reclassify</i>	Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024
10.	Peta Lahan Sawah Dilindungi	2021		Data Sekunder	Telaah Dokumen	Analisis Kuantitatif <i>Reclassify</i>	Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021
11.	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2025		Data Sekunder	Telaah Dokumen	Analisis Kuantitatif <i>Reclassify</i>	Keputusan Bupati Blitar No. B/180.05/310/409.1.2./KPTS/2025
12.	Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Blitar	Mengevaluasi Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Pola Ruang	2011-2031	Data Sekunder	Telaah Dokumen	Analisis Kauntitatif menggunakan <i>Overlay</i>	DPUPR Kabupaten Blitar
13.	Dokumentasi validasi Penggunaan Lahan	Validasi peta Penggunaan Lahan	2025	Data Primer	Survei Primer	Validasi spasial menggunakan koefisien <i>kappa</i>	Observasi Lapangan

Sumber : Hasil Analisis, 2026

C. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penyusunan penelitian terkait evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

a. Telaah Dokumen dan Kajian Studi Literatur

Telaah dokumen yang digunakan meliputi dokumen berupa standar teknis dan peraturan yang telah dipublikasikan. Selain itu, juga terdapat kajian studi literatur dari berbagai sumber terbuka berupa artikel, buku, website dan data sekunder seperti citra satelit yang berasal dari *Google Earth Engine* serta permohonan data ke Intansi terutama Dinas Pekerjaan Tata Ruang dan Pertanahan.

b. Validasi Lapangan

Validasi peta penggunaan lahan dengan menggunakan metode uji akurasi berdasarkan koefisien *kappa*. Untuk mendapatkan nilai akurasi yang komprehensif, perlu dibuat *confusion matrix* yang menggambarkan perbandingan sistematis antara hasil klasifikasi dengan kondisi eksisting di lapangan. Matriks ini menyajikan informasi detail tentang kecocokan dan ketidakcocokan klasifikasi untuk setiap kategori penggunaan lahan, serta memungkinkan perhitungan berbagai parameter akurasi seperti *user's accuracy*, *producer's accuracy*, *overall accuracy*, dan koefisien *Kappa*. Dalam menentukan koefisien *kappa* berdasarkan pada perhitungan berikut ini.

$$K = \frac{N \cdot \sum X_{ii} - \sum (X_{+i} \cdot X_{+i})}{N^2 - \sum (X_{+i} \cdot X_{+i})}$$

Sumber: (Stefanus et al., 2025)

Keterangan:

X_{ii} : Jumlah piksel terklasifikasi

X_{i+} : Jumlah piksel dalam baris

X_{+i} : Jumlah piksel dalam kolom

$\sum X_{ii}$: Total jumlah piksel yang diklasifikasikan benar

N : Jumlah piksel yang di uji

Nilai *Kappa* berada pada rentang 0-1, dimana nilai mendekati 1 menunjukkan tingkat keakuratan data hasil klasifikasi berdasarkan kondisi eksisting di lapangan. Sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan adanya dominasi hasil klasifikasi yang acak sehingga data dianggap tidak akurat. Berikut ini merupakan kategori tingkat kesesuaian akurasi *kappa*.

Tabel 1. 2 Kategori Kesesuaian Akurasi Kappa

No	Nilai Kappa	Kesesuaian
1.	<0	Kesesuaian sangat rendah
2.	0,01 – 0,20	Kesesuaian rendah
3.	0,21 – 0,40	Kesesuaian sedang
4.	0,41 – 0,60	Kesesuaian cukup
5.	0,61 – 0,80	Kesesuaian tinggi
6.	0,81 – 0,99	Kesesuaian sangat tinggi

Sumber : (Rahman et al., 2022; Viera & Garrett, 2005)

Uji akurasi penggunaan lahan didasarkan pada jumlah piksel yang akan divalidasi. Untuk itu perlu ditentukan untuk jumlah sampel yang akan dilakukan validasi lapangan dengan menggunakan metode grid. Grid yang digunakan berukuran 2x2 Km yang menghasilkan 520 grid untuk seluruh Kabupaten Blitar.

D. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis yaitu teknik pelaksanaan berdasarkan masing-masing analisis yang telah ditetapkan sebagai berikut :

a. Teknik Analisis *Overlay*

Teknik analisis overlay merupakan metode analisis spasial yang dilakukan dengan melakukan tumpang tindih dua atau lebih peta tematik untuk memperoleh informasi baru yang lebih lengkap. Dalam penelitian ini, analisis overlay digunakan dalam mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan pada tahun 1995, 2005, 2015, dan 2025. Kemudian juga digunakan untuk menghasilkan peta kesesuaian penggunaan lahan eksisting tahun 2025 dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031.

b. Teknik Analisis Korelasi

Analisis variabel pengaruh perubahan penggunaan lahan dalam penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan korelasional. Analisis ini memiliki tujuan untuk menghitung hubungan antara variabel bebas yang diduga memengaruhi perubahan penggunaan lahan dengan variabel terikat berupa perubahan penggunaan lahan (Pramitha et al., 2023). Uji korelasi digunakan sebagai metode statistik untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antarvariabel. Apabila data berdistribusi normal, analisis hubungan dilakukan menggunakan Korelasi *Pearson Product Moment*. Sedangkan korelasi *Spearman Rank* digunakan apabila data penelitian tidak berdistribusi normal. Nilai koefisien korelasi (r) berkisar antara -1 sampai +1, dengan interpretasi sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Interpretasi Nilai Korelasi

Besaran Nilai Koefisien	Interpretasi Koefisien Korelasi
0,00	Tidak dapat korelasi
0,01 – 0,20	Korelasi Sangat Lemah
0,21 – 0,40	Korelasi Lemah
0,41 – 0,70	Korelasi Sedang
0,71 – 0,99	Korelasi Tinggi
1,00	Korelasi Sempurna

Sumber: (Pramitha et al., 2023)

Analisis korelasi memerlukan adanya sampel data dari semua variabel yang digunakan. Penentuan sampel menggunakan rumus slovin dengan populasi berdasarkan jumlah polygo perubahan penggunaan lahan yang ada. Pada penelitian ini menggunakan taraf kesalahan sebesar 5%. Berikut ini merupakan rumus dalam penentuan sampel berdasarkan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Sumber: (Verawaty et al., 2022)

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = Populasi

d = taraf atau batas kesalahan

c. Teknik Evaluasi

Evaluasi tata ruang merupakan penilaian seberapa baik perencanaan tata ruang diimplementasikan dengan aturan yang telah ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peraturan perundangan terkait lainnya. Evaluasi dilakukan untuk meninjau tingkat keselarasan penggunaan ruang pada suatu wilayah terhadap fungsi ruang yang sudah direncanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, tingkat kesesuaian dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 1. 4 Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Rencana Tata Ruang

Kode	Skor Kesesuaian (%)	Keterangan
D7	0 – 15	Kesesuaian yang sangat rendah – perencanaan tata ruang perlu diterbitkan ulang dan revisi besar
D6 (P2)	16 – 30	Kesesuaian rendah – Perencanaan tata ruang perlu diterbitkan kembali dengan revisi sedang hingga kecil
D5	31 – 45	
D4 (NP)	46 – 60	

D3	61 – 75	Kesesuaian sedang – perencanaan tata ruang perlu evaluasi dengan sedikit penyesuaian
D2 (P1)	75 – 90	Kesesuaian tinggi – perencanaan tata ruang tidak membutuhkan evaluasi atau penyesuaian
D1	90 – 100	

Sumber: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9 tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

1.6.2 Hasil Akhir

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang RTRW Kabupaten Blitar didasarkan pada variabel peta penggunaan lahan eksisting dan peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031. Dari peta tersebut dilakukan analisis menggunakan metode *overlay* dan perhitungan evaluasi kesesuaian atau conformance. Ouput yang dihasilkan dari analisis tersebut adalah peta kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang RTRW. Melalui peta tersebut dapat dilakukan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan lahan eksisting yang digunakan sebagai dasar rekomendasi peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar.

1.7 Sistematika Pembahasan

Susunan laporan tugas akhir ini dibagi dalam 5 (lima) bagian dengan struktur pembahasan yang digunakan untuk menjelaskan isi bagian sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini memuat penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, tahapan proses, serta metode pelaksanaan dalam mencapai tujuan akhir dari penelitian, serta hasil akhir yang akan dihasilkan dari penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB 2 KONSEP PERENCANAAN

Bagian ini menjelaskan konsep perencanaan sebagai alur berpikir dan teori yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian serta indikator-indikator yang menjadi landasan pembahasan.

BAB 3 PROFIL KABUPATEN BLITAR

Bagian ini menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Blitar dari karakter fisik dan non fisik yang menjadi masukan dalam melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RENCANA POLA RUANG

Bagian ini menjelaskan hasil analisis dan pembahasan evaluasi kesesuaian penggunaan lahan yang meliputi identifikasi penggunaan lahan, analisis perubahan penggunaan lahan, analisis

variabel yang memengaruhi perubahan penggunaan lahan, analisis penyimpangan penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang, serta analisis evaluasi rencana tata ruang wilayah.

BAB 5 PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan dari hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.